

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Pendidikan juga memiliki peran sentral dalam membentuk kualitas generasi bangsa, peran kurikulum sebagai pedoman utama dalam proses pembelajaran sangatlah vital tidak hanya menjadi kumpulan rencana dan materi pembelajaran, tetapi juga mencerminkan nilai, ideologi, serta orientasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum sejatinya merupakan respons terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, berbagai perubahan kurikulum telah dilakukan sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Mulai dari Kurikulum 1947, 1964, 1975, 1984, 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, Kurikulum 2013 (K-13), hingga yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka yang mulai diperkenalkan secara bertahap sejak tahun 2021 dan mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun ajaran 2022/2023.

Di Indonesia, reformasi pendidikan yang digerakkan melalui Kurikulum Merdeka mencerminkan langkah transformasional menuju model pendidikan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada potensi siswa. Kurikulum Merdeka memberikan otonomi kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan sosial-budaya lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan karakter pelajar dan kompetensi abad ke-21. Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, dalam beradaptasi terhadap perubahan. Dalam situasi tersebut, Kurikulum Merdeka menawarkan kebebasan, fleksibilitas, serta fokus pada penguatan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka merupakan bentuk transformasi dari Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu padat konten, kurang fleksibel, dan tidak sepenuhnya mampu menjawab tantangan pembelajaran pascapandemi. Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Ciri-ciri utamanya antara lain: pembelajaran yang disederhanakan dan esensial, pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, serta penguatan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Kurikulum Merdeka menekankan pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan, tidak terburu-buru (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022: 7176). Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan pada paradigma Pendidikan yang lebih

kontekstual, inklusif, dan berpusat pada peserta didik (Agustina,2018). Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi individual peserta didik, serta memberikan ruang bagi kreativitas dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dari sudut pandang teori kurikulum, Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins (2004) menggaris bawahi bahwa kurikulum bukan sekadar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tertulis, melainkan seluruh pengalaman pembelajaran yang dialami siswa di bawah bimbingan institusi pendidikan. Mereka menekankan bahwa kurikulum sekolah harus memadukan dimensi filosofis, sosiologis, dan politis secara integral, serta memperhatikan proses pengembangan—dari perencanaan, pembangunan, hingga implementasi. Dalam kerangka teori mereka, satuan pendidikan (sekolah) memegang peran aktif sebagai agen pembentuk kurikulum nasional sehingga mampu mendesain kurikulum operasional yang mencerminkan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik.

Integrasi teori Ornstein & Hunkins menjadi penting dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Pertama, dimensi filosofis yang menekankan nilai-nilai dasar seperti kemerdekaan belajar, kemandirian, dan penguatan karakter menjadi fondasi utama yang harus tercermin dalam praktik di sekolah. Kedua, pendekatan terhadap pengembangan kurikulum dapat digolongkan menjadi dua: pendekatan teknikal-scientific yang bersifat sistematis dan top-down, serta

pendekatan non-technical seperti humanistik atau rekonseptualis yang menghargai fleksibilitas, partisipasi guru-siswa, dan adaptabilitas lokal. Ketiga, proses kurikulum menurut model mereka melewati tiga tahap: construction (penyusunan filosofis dan teoritis), development (pembangunan materi dan metode), dan implementation (pelaksanaan di kelas dan evaluasi berkelanjutan). Dalam praktik nasional, implementasi Kurikulum Merdeka telah diawali pada program Sekolah Penggerak sejak 2021 dan diperluas secara sukarela pada 2022. Guru diberi peran lebih sebagai desainer dan fasilitator, bukan hanya pelaksana. Platform Merdeka Mengajar (PMM) berfungsi sebagai pusat sumber daya, pelatihan, dan jaringan kolaboratif antar-guru (Komunitas Belajar) untuk memperkuat teacher agency serta kontekstualisasi perangkat ajar.

Impelementasinya kurikulum merdeka membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pendidikan di suatu Pendidikan. Oleh karena itu, kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan sebagai kunci sukses keberhasilan dalam Impelementasi kurikulum merdeka. Sebaik apapun kurikulum dibuat, jika dukungan pemangku kepentingan, selain Dinas Pendidikan maka warga sekolah juga sangat penting yang meliputi, kepala sekolah, guru, komite sekolah, orangtua dan masyarakat peduli pendidikan maka kurikulum tidak akan berjalan dengan baik. Seperti yang ditulis pressman & wildavsky (1984), menyatakan bahwa *“policy theory dentifies factors that nfluence policy mplementationz such as policy characteristics, stakeholders, social and political context, and the roles of mplementers”*

Bahwa teori ini mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kurikulum merdeka melibatkan beberapa komponen yang saling berkaitan. Menurut Haryanto (2019), keberhasilan Implementasi kurikulum ini bergantung pada peran aktif guru sebagai fasilitator siswa dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap.

Widodo et al. (2021) menyebutkan program sekolah penggerak menjadi bagian penting dari mplementasi Kurikulum Merdeka yang Bertujuan untuk menjadi model dan pusat keunggulan. dalam Implementasi Kurikulum Merdeka memeberikan nspirasi serta bimbingan kepada sekolah lainnya. Dalam struktur kurikulum, kurikulum merdeka mempunyai kecenderungan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dan memadukan pembelajaran antar disiplin. Menurut Kemendibud (2020), struktur kurikulum ini dirancang untuk memeberikan Fleksibilitas bagi sekolah dalam menentukan konten pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Implementasi Kurikulum Merdeka, telah mengadopsi berbagai macam strategi dan mekanisme. Contohnya adalah pengembangan *platform* digital *ID Belajar*, yang memeberikan akses ke sumber belajar dan alat bantu pembelajaran. Menurut Setiawan (2021), *ID Belajar* dapat menjadi sarana efektif untuk mendukung mplementasi Kurikulum Merdeka dan memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi.

Dari sejumlah komponen pemangku kepentingan, maka faktor kunci keberhasilan mplementasi Kurikulum Merdeka adalah terletak pada faktor guru . Guru berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Guru

berperan sebagai tonggak perubahan yang secara masif terlibat merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang reponsif terhadap kebutuhan anak. Menurut Haryanto (2019), guru memiliki peran central dalam menerapkan Kurikulum Merdeka ke dalam lingkup lokal, memilih dan megembangkan materi pelajaran yang relevan, serta merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Studi yang dilakukan oleh Wibowo et.al (2020) menunjukkan bahwa guru juga berperan sebagai penggerak perubahan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Guru Perlu mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan baru, serta mempunyai kemampuan unruk berkolaborasi sesama guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bertujuan pada pengembangan kompetensi siswa. Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dihadapkan pada factor pendukung dan hambatan yang dapat memepengaruhi kebrehasilan pelaksanaan.

Dalam konteks ini, teori kurikulum yang dikemukakan oleh Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins menjadi relevan untuk dianalisis. Menurut mereka, implementasi kurikulum tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor filosofis, sosiologis, dan politis yang kompleks. Mereka menekankan pentingnya pemahaman terhadap dimensi-dimensi tersebut dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum kabupaten Banjarnegara, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. Implementasi

Kurikulum Merdeka di jenjang SMP di daerah ini perlu dianalisis secara kritis untuk memahami sejauh mana kurikulum tersebut mampu menjawab kebutuhan lokal dan memberdayakan potensi peserta didik. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa tujuan Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SMP di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan kerangka teori kurikulum dari Ornstein dan Hunkins. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik pendidikan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal

Penerapan Kurikulum Merdeka di Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawa banyak potensi positif dalam menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan berbasis pada potensi masing-masing siswa, namun terdapat berbagai isu, hambatan dan tantangan yang ditas, mulai dari kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur. Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, siswa dan orang tua untuk menciptakan, ditemukan solusi atau kebijakan seperti apa yang dapat dilakukan terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan sekolah Menengah (SMP) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu Analisis Kritis Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai dasar Kurikulum Merdeka dengan praktik pembelajaran di kelas;
2. Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya kontekstual dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi lokal di Kabupaten Banjarnegara. Guru mengalami kendala dalam mengembangkan modul ajar;
3. Kesiapan dan pemahaman guru serta kepala sekolah terhadap implementasi Kurikulum Merdeka masih bervariasi.
4. Dukungan sistem dan kebijakan dari pemerintah daerah maupun satuan pendidikan belum merata;
5. Belum optimalnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan pendidikan dalam menunjang implementasi Kurikulum Merdeka.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyak masalah yang sangat luas, tidak mungkin untuk menggambarkan semua masalah secara rinci. Oleh karena itu perlu pembatasan masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Kajian implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SMP di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tiga dimensi analisis kurikulum dari Ornstein dan Hunkins,;

2. Fokus utama adalah pada bagaimana nilai-nilai dan kebutuhan lokal diakomodasi dalam proses pembelajaran, serta bagaimana aktor pendidikan menjalankan fungsinya dalam implementasi kurikulum.
3. Penelitian difokuskan pada tahun 2024/2025, dengan lokasi penelitian terbatas pada beberapa SMP yang mewakili kondisi geografis dan karakteristik sosial yang berbeda di Kabupaten Banjarnegara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemebtasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proses pembelajaran di SMP di Kabupaten Banjarnegara telah mencerminkan nilai-nilai dasar Kurikulum Merdeka seperti kemerdekaan belajar dan pengembangan potensi siswa? (dimensi filsafat)
2. Apakah Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan telah menyesuaikan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi lokal masyarakat Banjarnegara? (Dimensi Sosiologi)
3. Apakah guru dan kepala sekolah di Kabupaten Banjarnegara memahami dan mampu melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan dukungan sistem dan kebijakan yang memadai? (Dimensi Implementasi).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sejauh mana pembelajaran yang dilaksanakan di SMP mencerminkan nilai-nilai filsafat Kurikulum Merdeka, khususnya kemerdekaan belajar dan pengembangan potensi siswa.;
2. Menganalisis relevansi Kurikulum Merdeka dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal di Kabupaten Banjarnegara.
3. Menganalisis pemahaman dan kesiapan guru serta kepala sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka, serta dukungan kebijakan dan sistem yang menunjang implementasinya.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

★ Manfaat teoritis secara umum untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai penerapan Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Banjarnegara. Manfaat secara khusus untuk memberikan bahan pertimbangan dalam penerapan Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti yaitu memahami dan mengetahui seberapa besar dampak Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Banjarnegara;
- b) Bagi Guru dan kepala sekolah yaitu mengukur tingkat pemahaman dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di sekolah;
- c) Bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas Pendidikan bagi peserta didik di sekolah.

